JURNAL JENDELA ILMU **ISSN: 2721-6268**
Vol.7, No.1, Juni 2026, hlm. 16 - 21

Dekonstruksi Mitos Mutu dalam Perspektif Teologi Pendidikan Agama Kristen: Akreditasi sebagai "Berhala Baru" di Perguruan Tinggi

Skivo Reiner Watak[1*], Merdiati Marbun[2]

Pendidikan Agama Kristen, Universitas Kristen Papua
Email: skivowatak@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara kritis fenomena akreditasi pendidikan tinggi yang mengalami pergeseran fungsi dari instrumen penjaminan mutu menjadi tujuan institusional yang dominan. Melalui lensa Teologi Pendidikan Agama Kristen dan paradigma kritis, penelitian ini menganalisis bagaimana sistem akreditasi beroperasi dalam kerangka performativitas, rasionalitas instrumental, dan hiperrealitas. Analisis teoritik memanfaatkan perspektif Stephen J. Ball tentang performativitas, Max Weber mengenai rasionalitas instrumental, serta Jean Baudrillard tentang hiperrealitas, yang kemudian didialogkan dengan prinsip-prinsip teologis mengenai idolatri dan panggilan pelayanan akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik akreditasi kontemporer mendorong fabrikasi administratif yang mengkomodifikasi mutu pendidikan serta memicu alienasi pendidik dari tugas pastoral-akademiknya. Predikat akreditasi berpotensi menjadi "berhala baru", yakni ketika instrumen buatan manusia mendominasi orientasi institusi dan menggeser tujuan luhur formasi spiritual serta pembentukan karakter Kristiani. Artikel ini merekomendasikan transformasi evaluasi menuju model berbasis kepercayaan (trust-based evaluation) dan kolegialitas, guna mengembalikan kebebasan akademik dan fungsi perguruan tinggi Kristen sebagai ruang pencarian kebenaran Ilahi.

Kata Kunci : Akreditasi, Teologi Pendidikan Agama Kristen, Performativitas, Hiperrealitas, Idolatri, Kebebasan Akademik.

Deconstructing the Myth of Quality from the Perspective of Christian Religious Education Theology: Accreditation as the "New Idol" in Higher Education

Abstract

This article critically examines the phenomenon of higher education accreditation, which has shifted its function from a quality assurance instrument to a dominant institutional goal. Through the lens of Christian religious education theology and a critical paradigm, this research analyzes how the accreditation system operates within the framework of performativity, instrumental rationality, and hyperreality. The theoretical analysis utilizes Stephen J. Ball's perspective on performativity, Max Weber's concept of instrumental rationality, and Jean Baudrillard's notion of hyperreality, which are then dialogued with theological principles regarding idolatry and the call to academic service. The study results show that contemporary accreditation practices encourage administrative fabrication that commodifies the quality of education and triggers the alienation of educators from their pastoral-academic duties. The accreditation status has the potential to become a "new idol," namely when human-made instruments dominate the orientation of institutions and shift the noble goals of spiritual formation and the development of Christian character. This article recommends transforming evaluation toward a trust-based evaluation model and collegiality in order to restore academic freedom and the function of Christian higher education institutions as spaces for the search for divine truth.

Keywords: Accreditation, Theology of Christian Religious Education, Performativity, Hyperreality, Idolism, Academic Freedom

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi pada hakikatnya dibangun sebagai ruang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, membentuk karakter intelektual, serta menghasilkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam tradisi akademik klasik, universitas dipandang sebagai institusi yang memiliki otonomi untuk mencari dan mengembangkan kebenaran melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan tata kelola pendidikan tinggi telah menghadirkan tantangan baru terhadap fungsi ideal tersebut. Perguruan tinggi semakin dituntut untuk menunjukkan akuntabilitas, efisiensi, dan kinerja yang dapat diukur melalui berbagai instrumen evaluasi formal.[1]

Salah satu instrumen yang memperoleh posisi sangat strategis dalam sistem pendidikan tinggi modern adalah akreditasi. Pada mulanya, akreditasi dirancang sebagai mekanisme penjaminan mutu yang bertujuan membantu perguruan tinggi melakukan refleksi diri, mengidentifikasi kelemahan, dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan. Dalam kerangka ini, akreditasi seharusnya berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa proses akademik berjalan sesuai dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.[2]

Akan tetapi, perkembangan praktik akreditasi menunjukkan adanya pergeseran orientasi yang cukup mendasar. Di berbagai perguruan tinggi, perhatian terhadap proses akreditasi sering kali melampaui perhatian terhadap substansi pendidikan itu sendiri. Persiapan akreditasi tidak lagi dipahami sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu, melainkan menjadi proyek institusional yang menyita energi organisasi dalam skala besar. Dosen, tenaga kependidikan, hingga pimpinan perguruan tinggi diarahkan untuk memenuhi berbagai indikator, melengkapi dokumen pendukung, serta memastikan seluruh persyaratan administratif terpenuhi sesuai instrumen penilaian yang berlaku.[3]

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai hubungan antara akreditasi dan mutu pendidikan yang sesungguhnya. Apakah predikat akreditasi yang tinggi benar-benar mencerminkan kualitas akademik yang unggul? Ataukah akreditasi telah berkembang menjadi sebuah simbol yang lebih dihargai daripada realitas mutu yang diwakilinya? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika tidak sedikit perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi tinggi masih menghadapi persoalan mendasar dalam proses pembelajaran, produktivitas penelitian, maupun kontribusi sosial kepada masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari menguatnya budaya audit (audit culture) dalam tata kelola pendidikan tinggi. Budaya audit mendorong institusi untuk membuktikan kualitasnya melalui serangkaian indikator yang terukur dan dapat diverifikasi. Akibatnya, keberhasilan perguruan tinggi sering kali dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan laporan, dokumen, dan bukti administratif, bukan semata-mata berdasarkan dampak nyata dari aktivitas akademik yang dilakukan. Pada titik tertentu, ukuran-ukuran administratif tersebut berpotensi menggantikan tujuan pendidikan itu sendiri.[4]

Berbagai penelitian tentang akreditasi umumnya berfokus pada efektivitas kebijakan, kesiapan institusi, implementasi standar mutu, atau dampak akreditasi terhadap kinerja organisasi. Meskipun penting, pendekatan tersebut cenderung melihat akreditasi sebagai instrumen yang netral. Masih relatif sedikit kajian yang mencoba menelaah akreditasi sebagai fenomena sosial dan filosofis yang membentuk cara perguruan tinggi memahami mutu, mengelola sumber daya, dan menentukan prioritas kelembagaan. Padahal, pemahaman terhadap dimensi tersebut diperlukan untuk menjelaskan mengapa akreditasi dapat memperoleh posisi yang begitu dominan dalam kehidupan akademik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya melakukan pembacaan kritis terhadap fenomena akreditasi dalam pendidikan tinggi. Dengan memanfaatkan perspektif performativitas Stephen J. Ball, rasionalitas instrumental Max Weber, dan konsep hiperrealitas Jean Baudrillard, artikel ini menganalisis bagaimana akreditasi berpotensi mengalami transformasi dari instrumen penjaminan mutu menjadi tujuan institusional yang berdiri sendiri. Dalam konteks inilah akreditasi dipahami sebagai "berhala baru", yaitu sebuah simbol yang memperoleh legitimasi dan kekuasaan sedemikian besar sehingga mampu mengarahkan perilaku individu maupun organisasi, bahkan ketika simbol tersebut tidak selalu sejalan dengan kualitas akademik yang nyata.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya mendekonstruksi asumsi bahwa mutu pendidikan tinggi dapat direpresentasikan secara utuh melalui sistem akreditasi. Dengan pendekatan kritis, artikel ini tidak bermaksud menolak pentingnya penjaminan mutu, melainkan mengajak untuk meninjau kembali orientasi dan praktik evaluasi yang berkembang

saat ini. Melalui kajian ini diharapkan muncul ruang diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana sistem penjaminan mutu dapat dikembangkan secara lebih substantif, menghargai keberagaman konteks perguruan tinggi, serta tetap menjaga kebebasan dan otonomi akademik sebagai fondasi utama pendidikan tinggi.

Fenomena dominasi akreditasi dalam pendidikan tinggi dapat dipahami melalui beberapa perspektif teoretis. Pertama, konsep performativitas yang menjelaskan bagaimana institusi pendidikan terdorong untuk menampilkan citra kinerja yang sesuai dengan indikator penilaian eksternal.[5] Dalam situasi demikian, perhatian institusi sering kali beralih dari upaya meningkatkan kualitas secara substantif menuju upaya menghasilkan bukti-bukti yang dapat diverifikasi oleh mekanisme evaluasi. Kedua, konsep rasionalitas instrumental menunjukkan bahwa birokrasi modern cenderung mengutamakan efisiensi, standarisasi, dan kalkulasi sehingga nilai-nilai intrinsik pendidikan berisiko terpinggirkan.[6] Ketiga, simbol dapat memperoleh kedudukan yang lebih dominan daripada realitas yang diwakilinya.[3] Dalam konteks pendidikan tinggi, predikat akreditasi dapat dipahami sebagai simbol mutu yang pada kondisi tertentu justru lebih dihargai dibandingkan kualitas akademik yang sesungguhnya.[7]

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akreditasi memiliki kontribusi penting dalam mendorong tata kelola institusi, peningkatan akuntabilitas, dan pengembangan sistem penjaminan mutu. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek teknis implementasi, efektivitas kebijakan, atau ketercapaian indikator mutu. Kajian yang secara khusus menelaah akreditasi sebagai fenomena sosial, budaya, dan filosofis masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi ruang tersebut dengan menghadirkan pembacaan kritis terhadap akreditasi sebagai konstruksi simbolik yang berpotensi membentuk orientasi, perilaku, dan prioritas perguruan tinggi.[8]

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem akreditasi dalam pendidikan tinggi dapat mengalami transformasi dari instrumen penjaminan mutu menjadi tujuan institusional yang dominan.[9] Dengan menggunakan perspektif performativitas, rasionalitas instrumental, dan hiperrealitas, artikel ini berargumen bahwa praktik akreditasi kontemporer berpotensi menghasilkan ilusi mutu ketika indikator administratif lebih menentukan legitimasi institusi dibandingkan dampak nyata pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya mendekonstruksi hubungan antara simbol mutu dan mutu yang sesungguhnya serta menawarkan refleksi kritis mengenai masa depan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang lebih substantif dan berorientasi pada kebebasan akademik.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis (critical paradigm). Paradigma kritis dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur efektivitas akreditasi secara kuantitatif, melainkan memahami dan mengkritisi struktur pemikiran, relasi kuasa, serta praktik-praktik yang membentuk dominasi akreditasi dalam ekosistem pendidikan tinggi. Dalam perspektif ini, kebijakan dan instrumen evaluasi tidak dipandang sebagai perangkat yang netral, tetapi sebagai konstruksi sosial yang mengandung asumsi, kepentingan, dan konsekuensi tertentu terhadap kehidupan akademik.[10]

Metode yang digunakan adalah critical literature review. Berbeda dengan tinjauan pustaka konvensional yang berorientasi pada pemetaan hasil penelitian terdahulu, critical literature review bertujuan melakukan pembacaan reflektif dan evaluatif terhadap berbagai gagasan, teori, serta temuan penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari praktik akreditasi serta mengungkap berbagai implikasi yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.[11]

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas literatur akademik, artikel ilmiah, buku, regulasi pendidikan tinggi, dokumen penjaminan mutu, serta berbagai publikasi yang membahas akreditasi dan tata kelola perguruan tinggi. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema performativitas, budaya audit, birokratisasi pendidikan, kebebasan akademik, dan evaluasi mutu pendidikan tinggi.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi dan klasifikasi literatur berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan akreditasi dan penjaminan mutu. Kedua, interpretasi kritis terhadap berbagai konsep teoretis yang dikemukakan oleh Stephen J. Ball mengenai performativitas, Max Weber mengenai rasionalitas instrumental dan birokrasi, serta Jean Baudrillard mengenai simulacra dan hiperrealitas. Ketiga, sintesis konseptual untuk menjelaskan bagaimana praktik akreditasi dalam pendidikan tinggi

berpotensi mengalami transformasi dari instrumen evaluasi mutu menjadi tujuan institusional yang dominan.[5]

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika akreditasi dalam pendidikan tinggi sekaligus menawarkan refleksi kritis terhadap arah pengembangan sistem penjaminan mutu yang lebih substantif, kontekstual, dan berorientasi pada kebebasan akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akreditasi dan Komodifikasi Mutu Pendidikan Tinggi

Perkembangan sistem akreditasi dalam pendidikan tinggi menunjukkan bahwa konsep mutu tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kualitas intrinsik yang melekat pada proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mutu semakin sering direpresentasikan melalui simbol-simbol formal yang dapat diukur, dibandingkan melalui dampak nyata yang dihasilkan oleh institusi pendidikan. Dalam kondisi demikian, akreditasi mengalami transformasi dari instrumen evaluasi menjadi komoditas simbolik yang memiliki nilai strategis bagi perguruan tinggi.[12]

Predikat akreditasi yang tinggi tidak hanya berfungsi sebagai indikator kualitas, tetapi juga menjadi alat pemasaran yang memengaruhi persepsi publik. Perguruan tinggi dengan status "Unggul" atau peringkat tertinggi memperoleh keuntungan kompetitif dalam menarik mahasiswa, membangun reputasi, dan memperluas jejaring kerja sama. Akibatnya, perhatian institusi sering kali terfokus pada upaya mempertahankan atau meningkatkan status akreditasi dibandingkan melakukan refleksi kritis terhadap kualitas akademik yang sesungguhnya.

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari orientasi substantif menuju orientasi simbolik. Dalam banyak kasus, keberhasilan institusi lebih sering diukur berdasarkan capaian indikator formal daripada kualitas pengalaman belajar mahasiswa, relevansi penelitian terhadap kebutuhan masyarakat, atau kontribusi akademik terhadap pemecahan masalah sosial. Mutu akhirnya diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat dipertukarkan dalam ruang kompetisi antarperguruan tinggi.

Dalam perspektif kritis, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk komodifikasi mutu pendidikan. Akreditasi tidak lagi berfungsi terutama untuk meningkatkan kualitas, melainkan menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan politik. Ketika simbol mutu memperoleh perhatian yang lebih besar daripada mutu itu sendiri, pendidikan tinggi berisiko kehilangan orientasi dasarnya sebagai ruang pengembangan pengetahuan dan pembentukan manusia.

Alienasi Akademisi dalam Rezim Akreditasi

Salah satu dampak yang paling nyata dari dominasi sistem akreditasi adalah perubahan pola kerja akademisi. Dosen dan peneliti yang pada dasarnya berperan sebagai pengembang ilmu pengetahuan semakin dibebani oleh berbagai kewajiban administratif yang berkaitan dengan pemenuhan indikator mutu. Pengumpulan dokumen, penyusunan laporan, verifikasi data, dan berbagai aktivitas administratif lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan akademik sehari-hari.[13]

Pada satu sisi, dokumentasi memang diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas institusi. Namun, ketika tuntutan administratif berkembang secara berlebihan, aktivitas tersebut dapat mengurangi ruang bagi dosen untuk melaksanakan fungsi akademiknya secara optimal. Waktu yang seharusnya digunakan untuk melakukan penelitian, memperbaiki metode pembelajaran, atau membangun relasi dengan masyarakat sering kali tersita untuk memenuhi kebutuhan administrasi evaluasi.

Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk alienasi akademik. Akademisi perlahan terpisah dari esensi pekerjaannya karena semakin banyak energi yang dicurahkan untuk memenuhi tuntutan birokrasi. Produktivitas akademik kemudian tidak hanya dinilai dari kualitas gagasan atau kontribusi intelektual, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan berbagai bukti administratif yang dapat diverifikasi oleh sistem penilaian.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melahirkan budaya kerja yang menempatkan kepatuhan administratif di atas kreativitas intelektual. Perguruan tinggi dapat menjadi sangat efektif dalam menghasilkan laporan dan dokumen, tetapi kurang produktif dalam menghasilkan inovasi dan gagasan baru yang dibutuhkan masyarakat.

Standardisasi Mutu dan Hilangnya Keragaman Epistemologis

Sistem akreditasi pada dasarnya dibangun di atas asumsi bahwa mutu dapat dirumuskan melalui seperangkat standar yang berlaku secara umum. Standarisasi memang memiliki manfaat untuk menjamin adanya ukuran minimum kualitas yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi. Namun, persoalan muncul ketika standar tersebut digunakan secara seragam terhadap institusi yang memiliki karakteristik, sumber daya, dan konteks yang sangat beragam.

Perguruan tinggi di kota besar dengan dukungan infrastruktur yang memadai tentu memiliki kondisi yang berbeda dengan perguruan tinggi di daerah terpencil yang berhadapan dengan berbagai keterbatasan. Demikian pula, program studi yang bergerak dalam bidang seni, filsafat, atau ilmu-ilmu humaniora memiliki karakteristik yang berbeda dengan program studi di bidang teknik dan sains terapan. Ketika seluruh institusi dipaksa memenuhi indikator yang relatif sama, terdapat risiko bahwa keunikan dan kekhasan masing-masing institusi menjadi terabaikan.[14]

Akibatnya, banyak perguruan tinggi lebih terdorong untuk menyesuaikan diri dengan indikator yang tersedia daripada mengembangkan identitas akademiknya sendiri. Penelitian diarahkan untuk memenuhi target publikasi tertentu, kurikulum disusun mengikuti kebutuhan indikator penilaian, dan berbagai program institusional dirancang agar sesuai dengan standar evaluasi yang berlaku. Dalam situasi demikian, keberagaman epistemologis yang seharusnya menjadi kekuatan pendidikan tinggi justru berpotensi mengalami penyempitan.

Mutu akhirnya dipahami sebagai keseragaman, bukan keberagaman. Padahal, salah satu ciri utama universitas adalah kemampuannya mengembangkan berbagai pendekatan, perspektif, dan tradisi keilmuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.

Akreditasi, Pengawasan, dan Tantangan Otonomi Akademik

Selain memengaruhi perilaku organisasi dan individu, sistem akreditasi juga memiliki implikasi terhadap otonomi perguruan tinggi. Dalam banyak kasus, keputusan-keputusan strategis institusi semakin dipengaruhi oleh tuntutan pemenuhan indikator eksternal. Program kerja, kebijakan akademik, hingga alokasi sumber daya sering kali dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap hasil akreditasi.[3]

Situasi tersebut menciptakan bentuk pengawasan yang bekerja secara tidak langsung. Perguruan tinggi tidak harus selalu menerima instruksi eksplisit untuk mengubah perilakunya. Kehadiran sistem evaluasi itu sendiri sudah cukup untuk mendorong institusi menyesuaikan tindakan dan prioritasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan kata lain, pengawasan telah terinternalisasi dalam praktik pengelolaan institusi.[15]

Konsekuensi yang muncul adalah semakin terbatasnya ruang eksperimen akademik yang berada di luar indikator penilaian. Program-program inovatif yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap capaian akreditasi sering kali kurang memperoleh perhatian. Sebaliknya, aktivitas yang berpotensi meningkatkan skor evaluasi cenderung mendapatkan dukungan yang lebih besar.

Dalam konteks ini, tantangan utama pendidikan tinggi bukanlah bagaimana menghapus sistem akreditasi, melainkan bagaimana memastikan bahwa mekanisme evaluasi tidak mengurangi kebebasan akademik yang menjadi fondasi universitas. Sistem penjaminan mutu perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu menjaga akuntabilitas institusi tanpa mengorbankan kreativitas, otonomi, dan keberagaman intelektual yang menjadi sumber utama kemajuan ilmu pengetahuan.

4. KESIMPULAN

Artikel ini berangkat dari asumsi bahwa akreditasi pada dasarnya merupakan instrumen yang dirancang untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Namun, melalui pembacaan kritis terhadap praktik akreditasi kontemporer, ditemukan bahwa fungsi tersebut dalam banyak kasus mengalami pergeseran yang signifikan. Akreditasi tidak lagi semata-mata berperan sebagai alat evaluasi, melainkan telah berkembang menjadi tujuan institusional yang menentukan arah kebijakan, perilaku organisasi, dan prioritas perguruan tinggi.

Melalui perspektif performativitas, artikel ini menunjukkan bahwa sistem akreditasi mendorong institusi untuk berfokus pada pencapaian indikator yang dapat diukur dan diverifikasi. Akibatnya, muncul kecenderungan untuk memprioritaskan penyajian bukti administratif dibandingkan refleksi substantif terhadap kualitas pendidikan. Pada saat yang sama, logika rasionalitas instrumental menempatkan efisiensi, standarisasi, dan kepatuhan prosedural sebagai ukuran utama keberhasilan institusi. Kondisi tersebut berpotensi menggeser nilai-nilai dasar pendidikan tinggi

seperti kebebasan berpikir, pencarian kebenaran, kreativitas akademik, dan tanggung jawab sosial.

Lebih jauh, analisis menunjukkan bahwa predikat akreditasi telah memperoleh kedudukan simbolik yang sangat kuat dalam ekosistem pendidikan tinggi. Status akreditasi sering kali menjadi representasi utama mutu institusi di mata publik, bahkan ketika kualitas akademik yang sesungguhnya tidak selalu dapat direduksi ke dalam indikator yang tersedia. Dalam konteks ini, akreditasi berpotensi menjadi sebuah hiperrealitas, yaitu kondisi ketika simbol mutu memperoleh legitimasi yang lebih besar daripada realitas mutu yang diwakilinya.

Temuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menolak keberadaan akreditasi ataupun sistem penjaminan mutu. Sebaliknya, artikel ini menegaskan bahwa evaluasi mutu tetap merupakan kebutuhan penting dalam pendidikan tinggi. Yang perlu dikritisi adalah kecenderungan ketika instrumen evaluasi berubah menjadi tujuan utama, sehingga menggeser orientasi pendidikan tinggi dari pengembangan ilmu pengetahuan menuju pemenuhan tuntutan administratif. Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap mitos mutu bukanlah upaya menghapus akreditasi, melainkan usaha mengembalikan akreditasi pada fungsi dasarnya sebagai alat yang melayani pengembangan kualitas akademik

5. DAFTAR PUSTAKA

[1] S. R. Watak, "PENGEMBANGAN LITERASI DARI UKIP UNTUK PAPUA," vol. 2, no. 2, hal. 71–79, 2024.

[2] D. F. Rantesalu, "Pembentukan Karakter Remaja Dalam Gereja dan Pendidikan Masa Modern".

[3] S. R. Watak dan D. S. Tjandra, "Transformasi Manajemen Strategis Kurikulum : Integrasi MBKM Dan Outcome-Based Education," vol. 02, no. 02, hal. 185–195, 2026.

[4] Tim Rendaks, Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Trasmedia Pustaka. 2019.

[5] S. J. Ball, "The teacher ' s soul and the terrors of performativity," vol. 18, no. 2, hal. 215–229, 2003, doi: 10.1080/0268093022000043065.

[6] D. A. Widodo dan Rofi'ah, "Penyalahgunaan Minuman Keras Pada Remaja (Studi Kasus Di Kp. Bulak Amah Kelurahan Mekarwangi)," Manif. J. Gagasan Komunikasi, Polit. dan Budaya, vol. 1, no. 1, hal. 39–46, 2023.

[7] D. S. Tjandra, Diktat manajemen strategis dan sistem pendidikan. 2026.

[8] K. Lynch, "Critical Studies in Education Control by numbers : new managerialism and ranking in higher education," no. July, 2015, doi: 10.1080/17508487.2014.949811.

[9] M. Sauder dan W. N. Espeland, "The Discipline of Rankings : Tight Coupling and Organizational Change," vol. 74, hal. 63–82, 2009.

[10] E. a. Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, no. Maret. 2022.

[11] L. N. Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit," Aspirasi, vol. 4, no. 2, hal. 165–172, 2013.

[12] R. D. Montang, "The Holy Bible as the Word of God," vol. 104, no. 3, hal. 1–13, 2023.

[13] Syarifuddin, jamaluddin Bata Ilyas, dan A. Sani, "Pengaruh Persepsi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pada Kantor Dinas Di Kota Makassar," Bata Ilyas Educ. Manag. Rev., vol. 1, no. 2, hal. 51–56, 2021.

[14] N. V. Leuwol, S. R. Watak, dan F. Solissa, "A Model of Christian Family Custody in South West Papua Province," hal. 567–577, 2025.

[15] J. Anthoni, S. R. Watak, dan L. D. M. Renhoar, "PENTINGNYA PERAN PEMUDA GEREJA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS IMAN," NERIA, vol. 2, no. 2, 2024, doi: 10.56942/jurnalneria.v2i2.245.